

Pengaruh IPM, Dana Desa dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

The Influence of HDI, Village Fund, and Infrastructure to Economic Growth in 13 Districts/Cities in South Kalimantan

Akhmad Ripandi

Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Akhmadripandi.ar@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is the 13 districts/cities of the province of South Kalimantan consisting of 11 districts (Kotabaru, Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu) and two cities (Banjarbaru, Banjarmasin). This study uses the panel's return data analysis ti the Fixed Effect Model. The results of this study show that the index of human development, village funds, and infrastructure at the same time has a significant impact on economic growth. This study also indicates that the social development index is the dominant factor affecting economic growth in districts/cities in South Kalimantan in 2012-2016.

Abstrak

Objek penelitian ini adalah 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 11 kabupaten (Kotabaru, Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, tabalong, Tanah Bumbu) dan 2 kota (Banjarbaru, Banjarmasin). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan Model Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, dana desa dan infrastruktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2012-2016.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah bagus maka pembangunan ekonominya juga bagus. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah indeks pembangunan manusia, dana desa dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas manusia, apabila kualitas manusia itu bagus, maka hasil produktivitasnya juga akan meningkat dan ekonomi akan mengalami perkembangan.

Pada masa pemerintahan pak jokowi sekarang berbagai macam kebijakan berfokus kepada pembangunan-pembangunan di daerah, seperti mempercepat pembangunan di desa dengan memberikan dana desa ke pada desa melalui kabupaten dan juga mempercepat laju pembangunan infrastruktur di daerah guna menunjang kegiatan ekonomi.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang tingkat pertumbuhannya masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi lainnya di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,38% di tahun 2016. Hal ini masih jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan selatan tidak lepas dari perkembangan-perkembangan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota meningkat maka pertumbuhan ekonomi provinsi juga akan meningkat.

Rumusan Masalah

1. Apakah indeks pembangunan manusia, dana desa dan infrastruktur berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Faktor mana yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
3. Bagaimana arah kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan selatan terkait pengaruh ipm, dana desa dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan selatan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, dana desa dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan terkait pengaruh ipm, dana desa dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Solow (dalam jhingan, 2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti keahlian dan kemahiran tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat meningkatkan hasil produktivitasnya yang didukung juga dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan membantu dalam mempercepat dan meningkatkan hasil produksi. Solow juga mengatakan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja, apabila modal individu atau kelompok terpenuhi dan tenaga kerja juga terpenuhi maka akan dapat menghasilkan produksi.

Adam smith (dalam suryana, 2000) juga mengatakan bahwa perpaduan antara kemajuan teknologi dengan pertumbuhan penduduk akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi apabila kemajuan teknologi yang terjadi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk untuk dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Pemanfaatan teknologi ini tidak lepas dari sumber daya manusia dalam mengelolanya, manusia harus dituntut terampil dan ahli dibidangnya agar apa yang dihasilkan bisa lebih baik dan sesuai dengan harapan sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia

Todaro dan Smith (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kualitas dan kuantitas manusia atau dalam hal ini modal manusia yang didukung dengan perbaikan kesehatan, pendidikan dan pengeluaran

perkapita. Jika modal manusia bagus dilihat dari kesehatan dan pendidikannya yang bagus maka produktivitas yang akan dihasilkan juga akan bagus, dengan itu maka kegiatan ekonomi akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi akan dapat dicapai.

Pengukuran indeks pembangunan terbagi menjadi tiga bagian seperti yang disebutkan oleh UNDP :

1. Pendidikan yang dilihat dengan ukuran lama sekolah dan kemampuan baca tulis atau angka melek huruf.
2. Kesehatan yang dilihat dengan ukuran angka harapan hidup saat lahir atau bayi dan juga panjangnya usia.
3. Ekonomi yang dilihat dengan ukuran pengeluaran perkapita masyarakat dengan memerhatikan standar masyarakat untuk hidup layak.

Pembangunan manusia merupakan salah satu langkah dalam menjelaskan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan manusia itu meningkat maka kesejahteraan di masyarakat juga akan meningkat, kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya dari segi ekonomi melainkan segi sosial dan kesehatan lainnya.

Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu program yang mendukung pembangunan daerah, dana desa baru direalisasikan efektif pada tahun 2015 pada masa pemerintahan pak joko widodo. Dana desa tertuang di dalam undang-undang tahun 2014 nomor 6 yang mengatur tentang desa. Sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan bahwa dengan adanya dana desa diharapkan mampu membangun perdesaan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan khususnya antara kabupaten/kota.

Dana desa hanya diberikan untuk kabupaten yang memiliki desa, sedangkan kota tidak termasuk karena kota hanya mempunyai kelurahan. Seperti yang tertuang di dalam undang-undang tahun 2014 nomor 6 bahwa desa diharapkan bisa mengelola keuangannya sendiri dan melaporkan keuangannya sendiri dengan melaksanakan hal-hal yang mendukung pembangunan desa dengan tetap memperhatikan prioritas nasional. Desa diharapkan mandiri dan mampu menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi desa dengan menciptakan badan usaha milik desa.

Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu penunjang kegiatan ekonomi, melalui kegiatan yang dilakukan untuk berproduksi dengan menghasilkan kesempatan kerja dan output yang lebih banyak, infrastruktur juga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran dalam hal berkegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa pada sektor-sektor ekonomi tertentu. (hanafie, 2010).

Produktivitas perekonomian sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang lambatnya kegiatan ekonomi di daerah. (Aschauer, 1989). Aschauer juga mengatakan bahwa keterlambatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah disebabkan kualitas infrastruktur dan rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah. Pada akhirnya akan memunculkan masalah-masalah ekonomi baru pada daerah tersebut.

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari dana atau modal yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta, dalam hal ini dana pembangunan infrastruktur diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah melalui alokasi DAK bidang infrastruktur guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Alokasi DAK bidang infrastruktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 terdiri dari bidang infrastruktur jalan, sanitasi, irigasi, air minum dan perumahan yang dirumuskan langsung oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian oleh Ady Soejoto dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur”.
- 2) Penelitian oleh Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten Tulungagung”.
- 3) Penelitian oleh Rizky Kurniawan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh penyediaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari instansi terkait atau dari pihak ke tiga. Data primer dalam penelitian ini merupakan data berupa informasi dan penjelasan mengenai arah kebijakan yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai variabel penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa dokumentasi atau pelaporan-pelaporan tentang keuangan mengenai :

1. Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Indeks pembangunan manusia yang diperoleh dari Badan Pusat statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Dana desa yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Alokasi DAK Bidang Infrastruktur yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis statistik dengan model regresi data panel dengan menggunakan E-views 9.

Definisi Operasional Variabel

- 1) Pertumbuhan ekonomi merupakan naiknya kapasitas suatu proses produksi secara berkesinambungan dengan tercapainya peningkatan pendapatan yang lebih baik, diukur dalam satuan persen (%).
- 2) Indeks pembangunan manusia merupakan langkah dalam meningkatkan proses kegiatan ekonomi dengan memperhatikan 3 komponennya, yaitu

standar hidup layak, lama sekolah dan melek huruf serta angka harapan hidup manusia, diukur dalam satuan indeks.

- 3) Dana desa merupakan dana yang bersumber APBN yang diterima oleh desa yang dialokasikan dan diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, diukur dalam satuan rupiah (Rp).
- 4) Infrastruktur merupakan penunjang suatu keberhasilan pembangunan, dengan melihat sumber dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN dalam bentuk alokasi DAK bidang infrastruktur yang dialokasikan untuk kabupaten/kota guna menunjang pembangunan di daerah. Alokasi DAK bidang infrastruktur dirumuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam pengumpulan ini menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Analisis statistik dengan menggunakan regresi data panel dengan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melihat hasil uji F dan uji T.

Model regresi data panel merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Model regresi data panel :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Penjelasan :

Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi

β_0 = Koefisien Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

X_2 = Dana Desa (Rp)

X_3 = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur (Rp)

M = Error

i = 1, 2, 3, ..., 13 Kabupaten/Kota

t = 1, 2, 3, 4, 5, tahun 2012-2016

Untuk mengestimasi persamaan model data panel tersebut maka dapat digunakan beberapa teknik, diantaranya adalah PLS, FEM dan REM. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan beberapa model tersebut, maka didapat hasil bahwa model fixed effect lebih bagus untuk digunakan dibandingkan dengan model PLS dan REM. Hal ini didapatkan setelah melakukan pengujian terhadap model tersebut, yakni dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

- 1) Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 1
Perkembangan Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

No	Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	6,03	5,49	3,19	2,87	3,26

2	Kotabaru	6,53	5,22	4,66	3,35	4,23
3	Banjar	6,28	4,6	5,08	4,4	4,7
4	Barito Kuala	4,88	4,12	4,51	5,27	5,15
5	Tapin	6,32	5,75	5,44	4,05	4,85
6	Hulu Sungai Selatan	5,33	5,68	5,79	6,05	6,08
7	Hulu Sungai Tengah	4,85	5,83	5,56	6,13	6,21
8	Hulu Sungai Utara	5,4	5,34	5,99	5,34	4,7
9	Tabalong	5,33	4,36	4,03	2,36	3,06
10	Tanah Bumbu	6,29	3,8	3,78	2,93	3,11
11	Balangan	6,69	8,04	5,9	2,52	2,53
12	Kota Banjarmasin	6,18	6,93	6,11	5,79	6,28
13	Kota Banjarbaru	6,54	6,59	6,68	6,91	6,95
	Kalimantan Selatan	5,73	5,17	4,89	3,84	4,38

Sumber : BPS KALSEL

Berdasarkan tabel 1 di atas nampak bahwa mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012-2015, penurunan ini tidak dialami semua kabupaten/kota namun hanya beberapa saja mengalami penurunan. Penurunan ini didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki atau mengandalkan sektor pertambangan, seperti halnya kabupaten tanah laut yang mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 2.87% di tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2016 terdapat pada kabupaten balangan yang hanya mencapai 2.53%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2016 di capai oleh kota banjarbaru sebesar 6.95%, hal ini masih cukup bagus jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalsel yang hanya mencapai 4.38 ditahun 2016 yang tergolong masih cukup rendah.

2) Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (angka)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	65,16	66,11	66,5	66,99	67,44
2	Kotabaru	64,87	65,41	65,76	66,61	67,1
3	Banjar	65,04	65,36	65,71	66,39	66,87
4	Barito Kuala	61,62	62,12	62,56	63,53	64,33
5	Tapin	65,92	66,48	66,99	67,67	68,05
6	Hulu Sungai Selatan	64,03	64,59	65,25	66,31	67,52
7	Hulu Sungai Tengah	64,34	64,63	65,37	66,56	67,07
8	Hulu Sungai Utara	60,12	60,77	61,32	62,49	63,38
9	Tabalong	67,36	68,08	68,36	69,35	70,07
10	Tanah Bumbu	66,13	66,51	66,94	67,58	68,28
11	Balangan	63,69	64,03	64,44	65,34	66,25
12	Kota Banjarmasin	73,45	74,59	74,94	75,41	75,94
13	Kota Banjarbaru	76,67	77,1	77,3	77,56	77,96

Kalimantan Selatan	66,68	67,17	67,63	68,38	69,05
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS KALSEL

Berdasarkan tabel 2 di atas nampak bahwa angka pembangunan manusia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi dicapai lebih dari angka 70 yang dicapai oleh Kota banjarbaru sebesar 77.96 dan Banjarmasin sebesar 75.94 serta kabupaten tabalong sebesar 70.07 pada tahun 2016. Sedangkan angka pembangunan manusia terendah terdapat pada kabupaten HSU sebesar 63.38 di tahun 2016.

Jika dibandingkan angka pembangunan manusia kabupaten/kota dengan angka pembangunan manusia Kalimantan selatan masih jauh di bawah indeks Kalimantan selatan. Hal ini menandakan bahwa ukuran kesehatan, melek huruf dan lama sekolah serta hidup layak kabupaten/kota masih rendah dibandingkan Kalimantan selatan.

3) Dana Desa

Tabel 3
Perkembangan Dana Desa di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Dana Desa (Rp Miliar)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	12,24	12,3	7,21	36,68	80,03
2	Kotabaru	12,56	17,4	10,98	53,63	120,28
3	Banjar	23,27	19,62	15,36	73,26	164,33
4	Barito Kuala	16,7	11,79	10,81	52,01	116,66
5	Tapin	7,76	8,2	6,99	34,01	76,29
6	Hulu Sungai Selatan	11,37	12,01	7,99	38,94	87,36
7	Hulu Sungai Tengah	12,22	12,67	8,93	43,18	96,88
8	Hulu Sungai Utara	9,68	9,21	11,87	56,08	126,94
9	Tabalong	16,24	16,6	6,77	33,59	75,36
10	Tanah Bumbu	6,12	8,84	8,04	39,69	89,02
11	Balangan	4,64	5,2	8,54	41,05	92,09
12	Kota Banjarmasin	5,32	3,71	3,71	0	0
13	Kota Banjarbaru	1,95	2,3	2,3	0	0

Sumber : Dinas PMD KALSEL

Berdasarkan tabel 3 di atas nampak bahwa dana yang diserap desa yang bersumber dari APBN melalui program pemerintah dengan prioritas nasional mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi hampir semua kabupaten/kota dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014 mengalami penurunan disebabkan dengan perbedaan program yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

Kemudian dua tahun berikutnya yakni tahun 2015-2016 kembali mengalami kenaikan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintahan pak Jokowi guna menyongsong pembangunan desa. Dana desa tertinggi diterima oleh Barito Kuala sebesar 164.33 miliar rupiah di tahun 2016, sedangkan yang terendah diterima oleh Tabalong yang mencapai 75.36 miliar rupiah di tahun 2016.

4) Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

Tabel 4
Perkembangan Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

No	Kabupaten	Alokasi DAK Bidang Infrastruktur (Rp Miliar)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	2,77	3,81	6,15	118,31	92,04
2	Kotabaru	8,11	14,38	15,33	24,97	84,68
3	Banjar	15,23	1,6	7,34	48,36	143,25
4	Barito Kuala	17,04	27,66	26,38	135,54	259,45
5	Tapin	7,81	9,53	10,54	103,63	216,63
6	Hulu Sungai Selatan	9,84	12	15,08	110,01	236,09
7	Hulu Sungai Tengah	6,72	10,53	14,13	105,02	238,5
8	Hulu Sungai Utara	14,21	15,35	14,94	107,68	235,24
9	Tabalong	0	0	0	81,13	198,8
10	Tanah Bumbu	11,79	1,37	6,79	24,62	140,33
11	Balangan	0	0	10,92	20,29	142,63
12	Kota Banjarmasin	12,39	8,74	9,72	0	103,2
13	Kota Banjarbaru	13,46	14,66	18,9	88,32	164,39
	Kalimantan Selatan	26,67	23,6	36,69	40,01	38,81

Sumber : DJPK dan Kementerian PUPR

Berdasarkan tabel 4 di atas nampak bahwa alokasi DAK bidang infrastruktur yang diterima oleh kabupaten/kota cenderung mengalami kenaikan jumlahnya. Alokasi DAK bidang infrastruktur tahun 2012-2014 mencapai puluhan miliar setiap kabupaten/kota, akan tetapi pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang sangat besar untuk alokasi DAK bidang infrastruktur yang mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemerintahan yang mengakibatkan perbedaan kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur.

Alokasi DAK infrastruktur tertinggi pada tahun 2016 diterima oleh kabupaten barito kuala sebesar 259.45 miliar rupiah, sedangkan alokasi DAK infrastruktur yang terendah di tahun 2016 diterima oleh kabupaten kotabaru sebesar 84.68 miliar rupiah. Hal ini jika dibandingkan DAK infrastruktur yang diterima oleh pemerintah provinsi masih sangat jauh di bawah DAK infrastruktur yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

Hasil Analisis Regresi Data Panel
Hasil Regresi data Panel

Tabel 5
Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	T-statistic	Prob.	Keputusan
Konstanta	65.59783	3.843388	0.0003	Signifikan
IPM (X1)	-0.904147	-3.52376	0.0009	Signifikan
Dana Desa (X2)	-0.009421	-1.40601	0.166	Tidak signifikan

Infrastruktur (X3)	0.010601	2.765058	0.008	signifikan
R-squared	0.603392			
F-statistic	4.969837			
Prob. (F-statistic)	0.000009			

Berdasarkan Tabel 4 di atas maka dapat dituliskan persamaan regresi data panel, sebagai berikut :

$$\hat{Y}_{it} = 65.59783 - 0.904147 X1_{it} - 0.009421 X2_{it} + 0.010601 X3_{it}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 65.59783, apabila (X1) sebesar 0, (X2) sebesar 0 dan (X3) sebesar 0, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 65.59783. hasil regresi dengan program E-views9 di atas dapat dijelaskan bahwa perubahan variabel terikat di pengaruhi oleh variabel bebas.

- 1) Variabel bebas indeks pembangunan manusia (X1) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.904147. hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan X1 sebesar 1, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.90%.
- 2) Variabel dana desa (X2) memiliki nilai koefisien negative sebesar -0.009421. hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan X2 sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.009421%.
- 3) Variabel bebas alokasi DAK bidang infrastruktur (X3) memiliki nilai positif sebesar 0.010601. hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan X3 sebesar 1 miliar rupiah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.010601%.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel di atas yang ditunjukkan pada tabel 4 bahwa hasil F hitung adalah sebesar 4.969837 dengan F tabel sebesar 2.755481 melalui perhitungan sendiri dengan menggunakan rumus excel =FINV(0.05,3,61). Hal ini berate jika dibandingkan maka F hitung lebih besar dari padi F tabel, sebesar $4.969837 > 2.755481$, yang artinya variabel bebas (indeks pembangunan manusia, dana desa dan infrastruktur) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi) di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini juga dibuktikan dengan nilai probabilitas F yang kurang dari 0.05, yaitu sebesar $0.000009 < 0.05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Parsial (Uji T)

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki nilai probabilitas t sebesar 0.0009 yang berarti lebih kecil dari 0.05, yang artinya bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana desa memilik nilai probabilitas sebesar $0.1660 > 0.05$, yang artoinya bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi DAK bidang infrastruktur memiliki nilai probabilitas

sebesar $0.0080 < 0.05$, artinya alokasi DAK bidang infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 adalah indeks pembangunan manusia.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0.603392 yang berarti bahwa kemampuan variabel indeks pembangunan manusia, dana desa dan alokasi DAK bidang infrastruktur dalam menjelaskan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh sebesar 60.34%, sedangkan 39.66% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, dana dan infrastruktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan selatan adalah indeks pembangunan manusia. Pengaruh ini tidak lepas dari arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan selatan untuk meningkatkan laju pertumbuhan di kabupaten/kota.

Kebijakan ini tercantum di dalam RPJMD provinsi tahun 2016-2021, diantaranya adalah berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Diantaranya adalah :

1. Peningkatan kesehatan dengan pengembangan pola kesadaran untuk hidup sehat kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang baik pada institusi pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan anak usia sekolah dengan pendidikan yang berkarakter melalui peningkatan sekolah kejuruan pada kabupaten/kota.
3. Pembangunan waduk sebagai upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat dan percepatan pembangunan irigasi.
4. Pembangunan jaringan jalan yang merata ke semua daerah di Kalimantan selatan.

Arah kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan selatan terkait dana desa itu merupakan kewenangan desa itu sendiri tetapi tetap memerhatikan prioritas nasional. Pemerintah daerah hanya bersifat dukungan dan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil uji tersebut ipm berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa apabila ipm mengalami kenaikan maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak selaras dengan teori yang mengatakan bahwa ipm berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap harus meningkatkan pembangunan manusia dengan fokus pembangunan kualitas manusia tersebut agar manusia dapat memproduksi hasil produksinya dengan baik.

Dana desa juga memiliki pengaruh yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak signifikan. Hal ini tentu saja berbeda dari harapan pemerintah sebelumnya untuk pembangunan daerah melalui pembangunan desa.

Pengaruh ini terjadi disebabkan karena keterbatasan sumberdaya manusia dalam mengelola keuangan dan pelaporan desa serta ketidak sesuaian dalam merencanakan pembangunan desa. Ini merupakan suatu masalah bagi desa dan harus diselesaikan dengan pendampingan desa yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing kabupaten.

Alokasi DAK bidang infrastruktur mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur guna melancarkan kegiatan ekonomi di daerah. Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional bahwa peningkatkan belanja Negara diarahkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung guna tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan arah kebijakan pemerintah daerah provinsi Kalimantan selatan sudah sesuai guna mendukung dan neggerkan laju pertumbuhan ekonomi daerah ang tetap berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur ebagai pendukungnya, dengan itu maka masyarakat akan lebih mudah dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi di kabupaten/kota di Kalimantan selatan.

Keterbatasan Penelitian

Ketersediaan data dana desa alokasi DAK bidang infrastruktur yang tidak lengkap dan mengakibatkan penulis sulit untuk melakukan pengujian. Dana desa hanya dialokasi untuk desa-desa yang ada di kabupaten, sedangkan kota tidak menerima dana desa dikarenakan kota tidak memiliki desa, tetapi memilik kelurahan. Hal ini terjadi pada tahun tahun 2015-2016 di kota Banjarbaru dan kota Banjarmasin.

Data alokasi DAK bidang infrastruktur pada kabupaten/kota juga masih memiliki kekurangan, yakni terdapat beberapa data yang kosong karena ada beberapa kabupaten/kota yang tidak menerima DAK bidang infrastruktur. Hal ini terjadi pada tahun 2012-2014 yang kosong karena tidak menerima dana desa berdasarkan sumber yang diperleh dari direktorat jenderal perimbangan keuangan, ini juga terjadi pada kabupaten balangan tahun 2012 dan 2013 serta pada kota Banjarmasin di tahun 2015 dikarenakan pemerintah kabuoaten tabalong dan balangan mendapatkan bantuan dan kerjasama dengan perusahaan pertambangan di sana untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Simpulan

Indeks pembangunan manusia, dana desa dan alokasi DAK bidang infrastruktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekono di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016. Dengan pengaruh masing-masing variabel berbeda-beda, ipm berpengaruh signifikan negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dana desa tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan alokasi DAK bidang infrastruktur berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia merupakan faktor yang domina mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten/kota di Provins Kalimantan Selatan.

DAFTAR REFERENSI

Ady Soejoto, 2017. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 5 No. 3 Tahun 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

Jhingan, M.L, (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang *Kriteria Teknis Kegiatan DAK*.

Suryana, (2000). *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta.

Todaro dan Smith, (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. United Kingdom. Pearson Education Limited.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.